

Pendidikan Anti Korupsi di dalam Perguruan Tinggi Pelayaran: Upaya Membangun Integritas dalam Industri Maritim

Anti-Corruption Education in Shipping Universities: Efforts to Build Integrity in the Maritime Industry

Muhammad David¹, Nuriyanti², Panggi Nur Adi³, Dita Romadhoni⁴, Aina Nurdiyanti⁵

^{1,4} Politeknik Pelayaran Malahayati, Aceh

² Peneliti Pendidikan, Aceh

³ Universitas Labuhan Batu, Sumatera Utara

⁴ Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Article Info

Article history:

Received Feb 19, 2024

Revised Mar 20, 2024

Accepted Mar 25, 2024

Kata Kunci:

Pendidikan Anti Korupsi,
Pelayaran, Integritas,
Pendidikan Maritim, Maritim.

Keywords:

Anti-Corruption Education,
Shipping, Integrity, Maritime
Education, Maritime.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki strategi dan pendekatan pendidikan anti korupsi yang diterapkan di perguruan tinggi pelayaran, dengan fokus pada upaya membangun integritas dalam industri maritim. penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data model penelitian deskriptif-analitis. Hal ini bertujuan untuk mengkaji literatur dan sumber informasi yang relevan. Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa pendidikan anti korupsi harus menjadi bagian integral dari pendidikan maritim. Strategi yang efektif mencakup penggunaan studi kasus nyata, simulasi situasi korupsi, dan pembelajaran kolaboratif untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap risiko korupsi dalam konteks maritim. Pendekatan holistik juga diterapkan melalui kolaborasi dengan industri, pembentukan kode etik, dan pembiasaan nilai-nilai integritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi dan pendekatan ini dapat menciptakan lulusan perguruan tinggi pelayaran yang lebih sadar akan praktik anti korupsi, memperkuat integritas, dan berkontribusi pada peningkatan etika dalam industri maritim.

ABSTRACT

The aim of this research is to explore the strategies and approaches used by shipping universities to teach anti-corruption practices and build integrity in the maritime industry. The study was carried out using a descriptive-analytical research model that involved reviewing relevant literature and sources of information. The findings of this research suggest that anti-corruption education should be an essential part of maritime education. Effective educational strategies include the use of real-life case studies, simulations of corruption scenarios, and collaborative learning to enhance students' understanding of corruption risks in the maritime context. A holistic approach is also adopted, which involves collaboration with industry, establishing a code of ethics, and cultivating the values of integrity. The research results indicate that implementing this approach can produce graduates who are more aware of anti-corruption practices, promote integrity, and contribute to improving ethics in the maritime industry.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



*Corresponding Author:**Name:* Muhammad David*Institution:* Politeknik Pelayaran Malahayati, Jl. Laksamana Malahayati KM. 19 No. 12, Durung, Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar, Aceh – 23381*Email:* muhddavid@poltekpelaceh.ac.id**1. PENDAHULUAN**

Industri maritim adalah sektor ekonomi yang berkaitan dengan aktivitas yang terjadi di perairan, baik laut, sungai, dan danau. Ini mencakup berbagai jenis kegiatan, seperti transportasi laut, perikanan, eksplorasi dan produksi energi di bawah laut, pariwisata bahari, pembuatan kapal, serta industri-industri pendukung lainnya. Industri maritim memiliki peran penting dalam perekonomian global karena memungkinkan perdagangan internasional, penyediaan sumber daya alam, dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, industri ini juga berperan dalam menjaga lingkungan laut dan keberlanjutan ekosistem maritim.

Salah satu aspek utama dari industri maritim adalah transportasi laut, yang memungkinkan perdagangan internasional yang efisien dan distribusi barang secara global. Lebih dari 80% perdagangan dunia dilakukan melalui jalur laut, yang menjadikan transportasi laut sebagai tulang punggung ekonomi global (UNCTAD, 2021). Industri ini juga memiliki potensi besar untuk pengembangan energi terbarukan, seperti tenaga angin laut dan energi ombak, yang dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil (IEA, 2020).

Selain itu, industri maritim juga memiliki dampak langsung terhadap pelestarian lingkungan laut dan keberlanjutan ekosistem maritim. Kegiatan seperti perikanan dan pariwisata bahari harus diatur dengan bijak untuk mencegah penangkapan berlebihan dan kerusakan lingkungan laut yang dapat merusak ekosistem laut yang rapuh (Boehm, 2007). Pemahaman akan pentingnya konservasi laut telah mengarah pada upaya perlindungan

lebih banyak wilayah laut sebagai kawasan yang dilindungi (Parsa, 2008). Kegiatan seperti konstruksi kapal, pengelolaan pelabuhan, dan layanan pelayaran menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang di seluruh dunia (UNCTAD, 2021).

Sebagai industri penting yang perlu mendapat perhatian khusus, Integritas memiliki peran yang sangat penting dalam industri maritim dan merupakan faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan, keamanan, dan efisiensi sektor ini. Namun, dalam praktiknya banyak persoalan yang masih ditemukan, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan permasalahan korupsi. Ada beberapa permasalahan korupsi yang masih masif terjadi dalam industri maritim, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Suap dan Nepotisme: Praktik suap dan nepotisme yang memengaruhi pengaturan kontrak, lisensi, dan pengawasan. Kedua, Penyelundupan: Korupsi di pelabuhan dan pengawasan pemerintah memungkinkan penyelundupan barang terlarang, termasuk narkoba dan senjata. Ketiga, Kecurangan Bea Cukai: Perusahaan maritim seringkali menghindari pembayaran bea cukai yang seharusnya mereka bayarkan. Keempat, Pelanggaran Lingkungan: upaya pelanggaran peraturan lingkungan, seperti pembuangan limbah berbahaya ke laut. Kelima, Kebocoran Informasi Rahasia: Praktik korupsi melibatkan pelepasan informasi rahasia tentang rute kapal atau kargo berharga kepada pihak yang tidak berwenang, mengancam keamanan nasional dan keberlanjutan bisnis.

Berdasarkan uraian permasalahan yang sering terjadi diatas, maka ada beberapa konteks pentingnya integritas dalam industri maritim yang berhubungan dengan persoalan korupsi yang sering terjadi, diantaranya

meliputi beberapa kepentingan sebagai berikut:

Pertama, Keselamatan Pelayaran: Keselamatan pelayaran adalah aspek paling krusial dalam industri maritim. Integritas dalam pengawasan, perawatan kapal, dan peraturan keselamatan sangat penting. Korupsi dapat mengarah pada pelanggaran keselamatan yang berisiko, seperti kapal yang tidak terawat dengan baik atau pelanggaran prosedur keselamatan yang tersembunyi. Kedua, Perlindungan Lingkungan: Industri maritim memiliki dampak besar terhadap lingkungan laut. Integritas diperlukan dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, seperti peraturan pengelolaan limbah dan pengawasan terhadap pengiriman bahan berbahaya. Korupsi bisa memungkinkan praktik-praktik ilegal yang merusak lingkungan laut. Ketiga, Keamanan Maritim: Integritas berperan dalam menjaga keamanan perairan internasional. Korupsi di pelabuhan atau lemahnya pengawasan dapat membuka pintu bagi penyelundupan barang terlarang, termasuk senjata dan narkoba. Keempat, Ekonomi Nasional: Industri maritim memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, baik melalui perdagangan internasional maupun sektor pariwisata. Korupsi dalam pengaturan tarif, bea cukai, atau insentif perdagangan dapat merugikan ekonomi negara. Kelima, Kredibilitas dan Kepercayaan: Integritas adalah faktor kunci dalam membangun kredibilitas dan kepercayaan dalam industri maritim. Pelaku bisnis, pemerintah, dan masyarakat internasional harus percaya bahwa praktik-praktik korupsi tidak merajalela dalam sektor ini.

Kepentingan dan persoalan yang pelik dalam urusan korupsi di industri maritim telah mendapat perhatian khusus dalam penelitian ini, setidaknya hal ini mesti direspon dari sisi akademis, dengan memetakan bagaimana persoalan yang terjadi dapat dicegah melalui kegiatan akademis melalui lembaga pendidikan yang relevan. Kegiatan pendidikan yang paling dengan kegiatan maritim ialah Perguruan tinggi

pelayaran. Dalam hal ini perguruan tinggi pelayaran memegang peran penting penciptaan sumber daya maritim yang bebas dari permasalahan korupsi. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, mengapa perguruan tinggi maritim dapat menjadi jalan agar terhindarnya praktik korupsi di dunia maritim, ialah sebagai berikut:

Pertama, Perguruan tinggi maritim dapat memberikan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas kepada calon profesional maritim. Hal ini akan meningkatkan pengetahuan mereka tentang etika dan tata kelola yang baik dalam industri maritim, yang dapat mengurangi praktik korupsi (Demirel, 2020). Kedua, Perguruan tinggi maritim dapat membantu mengembangkan kode etik yang diterima secara luas dalam industri maritim, yang akan menjadi pedoman bagi para profesional untuk menghindari praktik korupsi (UNODC, 2018). Ketiga, Perguruan tinggi maritim dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika dan integritas dalam profesi maritim melalui program pendidikan dan sosialisasi (Froholdt, dkk., 2020). Keempat, Perguruan tinggi maritim dapat menyelenggarakan program pelatihan anti-korupsi untuk profesional maritim yang sudah bekerja. Hal ini dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang risiko korupsi (Kabir, 2019). Kelima, Perguruan tinggi maritim dapat menjadi advokat transparansi dalam kebijakan maritim dan mengadvokasi praktik bisnis yang lebih etis (Psaraftis, 2020). Keenam, Perguruan tinggi maritim dapat membantu menciptakan sumber daya manusia unggul dalam industri maritim, yang memiliki integritas tinggi dan siap untuk menghindari praktik korupsi (DS, S. H., Nugraha, dkk, 2018).

Berdasarkan latar belakang masalah dan realitas yang telah diuraikan di atas, penulis ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana strategi penerapan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi pelayaran dengan tujuan untuk memahami dan

memetakan pendekatan yang ideal dalam mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dalam kurikulum dan pembelajaran di perguruan tinggi pelayaran. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang berjudul "Pendidikan Anti Korupsi di dalam Perguruan Tinggi Pelayaran: Upaya Membangun Integritas dalam Industri Maritim".

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data akan dikumpulkan melalui model penelitian deskriptif-analitis. Hal ini bertujuan untuk mengkaji literatur dan sumber informasi yang relevan, dalam upaya menganalisis secara kritis terkait strategi dan pendekatan dalam mengintegrasikan pendidikan anti korupsi dalam pembelajaran di perguruan tinggi pelayaran.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Korupsi

Korupsi adalah tindakan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi atau kepentingan pribadi dengan merugikan orang lain atau masyarakat secara umum. Ini adalah perilaku yang melibatkan manipulasi atau penyalahgunaan kepercayaan publik dan penggunaan sumber daya publik atau kekuasaan untuk tujuan pribadi yang merugikan atau merugikan kepentingan umum. Korupsi bisa merusak tata kelola yang baik, keadilan, dan stabilitas suatu negara serta menghambat pembangunan ekonomi dan sosial.

Konsep korupsi mencakup berbagai bentuk dan tingkat, mulai dari korupsi kecil dalam bentuk suap sehari-hari hingga korupsi yang melibatkan skandal besar yang melibatkan pejabat pemerintah tingkat tinggi.

Ada beberapa bentuk korupsi yang umum, diantaranya ialah yang Pertama,

Suap. Memberikan atau menerima uang atau barang berharga sebagai imbalan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum atau melanggar etika. Kedua, Nepotisme. Memberikan keuntungan atau kesempatan kepada anggota keluarga atau teman-teman dekat tanpa mempertimbangkan kualifikasi atau kepatutan. Ketiga, Pungutan Liar. Memungut uang secara ilegal dari individu atau perusahaan sebagai syarat untuk memberikan izin atau pelayanan yang seharusnya tersedia tanpa biaya tambahan. Keempat, Pencucian Uang. Proses menyamarkan asal usul uang yang diperoleh secara ilegal sehingga tampak legal. Korupsi Struktural. Terjadi ketika sistem atau struktur pemerintahan secara inheren rentan terhadap praktik korupsi.

Korupsi Dalam Industri Maritim

Korupsi adalah perbuatan ilegal yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau sumber daya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kepentingan pribadi dengan merugikan orang lain atau masyarakat secara luas. Ini adalah tindakan yang melibatkan manipulasi, suap, nepotisme, atau praktik tidak etis lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan norma, etika, atau hukum yang berlaku. Dalam industri maritim, korupsi dapat memiliki dampak yang merusak dan serius. Masalah korupsi dalam industri maritim adalah permasalahan yang sering terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Setidaknya ada beberapa poin yang menjadi sorotan penting dari perilaku korupsi yang terjadi dalam industri maritim, sebagai berikut:

Pertama, Penyuapan di Pelabuhan: Praktik penyuapan dalam proses pengurusan dokumen impor dan ekspor, pemeriksaan kargo, serta perizinan kapal di pelabuhan sering terjadi. Ini dapat mengganggu alur logistik dan mempengaruhi efisiensi perdagangan maritim (Transparency International, 2017). Kedua, Kejahatan Laut: Korupsi dapat memungkinkan aktivitas kejahatan laut seperti perompakan dan

pengurian kapal untuk berkembang, karena pihak berwenang mungkin membiarkan kapal-kapal yang terlibat dalam kejahatan tersebut beroperasi dengan impunitas (UNODC, 2019). Ketiga, Pengawasan Ketat: Ketidakjelasan dalam pengawasan dan penegakan hukum maritim dapat menciptakan celah yang memungkinkan praktik korupsi berlangsung tanpa ada sanksi yang tegas (U4 Anti-Corruption Resource Centre, 2019). Keempat, Izin Pelayaran: Penyelenggaraan izin pelayaran yang dapat dimanipulasi atau diperoleh dengan membayar suap dapat membahayakan keselamatan kapal dan awak kapal (Lujala, P., & Rustad, S, 2013). Kelima, Pengelolaan Sumber Daya Alam: Korupsi dapat memengaruhi pengelolaan sumber daya alam laut, seperti penangkapan ikan yang berlebihan atau ilegal, yang dapat merusak ekosistem laut (Le Billon, P., & Lujala, P, 2020). Keenam, Keamanan Perbatasan: Pemeriksaan yang kurang ketat di perbatasan maritim dapat memungkinkan penyelundupan barang ilegal, senjata, atau narkoba (Brooks, D., & Fritsch, M, 2016). Ketujuh, Pemberian Lisensi Kapal: Pemberian lisensi kapal yang tidak adil atau berdasarkan hubungan yang buruk dengan pejabat pemerintah dapat memengaruhi kompetisi di antara perusahaan pelayaran (Mackay, dkk., 2020).

Peran Perguruan Tinggi Pelayaran dan Masalah korupsi

Dalam merentaskan masalah diatas, Perguruan tinggi pelayaran memiliki peran yang sangat penting. Perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam berbagai cara untuk menciptakan lingkungan maritim yang lebih transparan, etis, dan bebas dari korupsi (Kabir, 2014). Pertama, perguruan tinggi pelayaran dapat memberikan pendidikan dan pelatihan yang kuat kepada calon pelaut, yang meliputi etika dan integritas maritim, serta pemahaman yang mendalam tentang hukum maritim dan peraturan terkait. Hal ini akan membantu menciptakan budaya etis di antara para pelaut dan mengurangi potensi untuk tindakan korupsi.

Selain itu, perguruan tinggi pelayaran dapat melakukan penelitian yang berfokus pada masalah korupsi di dunia maritim. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi sumber masalah dan mengembangkan solusi yang efektif untuk mengatasi korupsi. Perguruan tinggi juga dapat berkolaborasi dengan pihak berwenang, organisasi internasional, dan industri maritim untuk mengadvokasi praktik-praktik anti-korupsi yang lebih ketat. Perguruan tinggi pelayaran juga dapat menjadi pusat informasi dan pelaporan yang penting untuk insiden korupsi di dunia maritim. Mereka dapat menyediakan platform yang aman bagi pelaut dan pihak terkait untuk melaporkan tindakan korupsi tanpa takut represalias. Selain itu, mereka dapat membantu dalam investigasi insiden-insiden tersebut dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk menindak pelaku korupsi.

Selanjutnya, perguruan tinggi pelayaran dapat mengadakan seminar, konferensi, dan pelatihan berkala tentang etika dan integritas maritim untuk para profesional maritim yang sudah berkarir. Ini akan membantu memperbarui pengetahuan mereka tentang praktik-praktik anti-korupsi terbaru dan membangun jaringan dengan sesama pelaut yang memiliki nilai-nilai yang sama.

Terakhir, perguruan tinggi pelayaran dapat bekerja sama dengan industri maritim dan pemerintah untuk mengembangkan kode etik dan pedoman praktik bisnis yang mengedepankan integritas dan transparansi. Ini akan membantu menciptakan kerangka kerja yang jelas bagi pelaku bisnis di sektor maritim dan mengurangi peluang untuk tindakan korupsi.

Prinsip Penerapan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Pelayaran.

Prinsip pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi pelayaran merupakan landasan yang krusial untuk membentuk calon pemimpin maritim yang etis dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini

membantu menghindari praktik korupsi yang merusak integritas sektor maritim dan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan industri pelayaran (Musofiana, 2020).

Pertama, transparansi menjadi salah satu prinsip utama dalam pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi pelayaran. Mahasiswa harus diajarkan untuk melakukan semua aktivitas dengan kejelasan dan keterbukaan sehingga tidak ada ruang bagi praktik korupsi yang tersembunyi. Kedua, integritas moral dan etika profesi harus ditanamkan dalam kurikulum. Mahasiswa harus memahami nilai-nilai moral yang tinggi dan etika dalam melakukan tugas maritim. Ini akan membantu mereka menolak tawaran suap atau praktik korupsi lainnya yang dapat merusak integritas mereka. Ketiga, partisipasi aktif dalam program pendidikan anti korupsi harus diwajibkan. Mahasiswa dan staf perguruan tinggi pelayaran harus terlibat dalam pelatihan, seminar, atau lokakarya yang menggali masalah korupsi dan cara menghindarinya. Keempat, pertumbuhan kepemimpinan yang berintegritas harus ditekankan. Perguruan tinggi harus mempromosikan pembentukan calon pemimpin maritim yang memiliki tekad untuk menjalankan tugas mereka tanpa terlibat dalam praktik korupsi.

Terakhir, penerapan sanksi tegas untuk pelanggaran etika dan korupsi harus ada. Mahasiswa yang terlibat dalam indikasi praktik korupsi harus dihukum sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku, sehingga memberikan pesan kuat bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi dalam komunitas maritim. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pendidikan anti korupsi ini, perguruan tinggi pelayaran dapat berperan penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung integritas, etika, dan pemberantasan korupsi di sektor maritim, serta melahirkan calon pemimpin maritim yang bermoral tinggi dan profesional.

Pendekatan ideal dalam penerapan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi

pelayaran merupakan suatu strategi holistik yang mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi ke dalam seluruh aspek pendidikan, pembelajaran, dan budaya institusi. Berikut merupakan beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi pelayaran dalam menerapkan strategi implementasi pendidikan anti korupsi, diantaranya ialah:

Pertama, Kebijakan dan Komitmen Institusi: Perguruan tinggi pelayaran yang menjalankan pendidikan anti korupsi harus memiliki kebijakan yang jelas dan komitmen kuat dari pimpinan serta seluruh staf akademik dan administratif. Kebijakan ini harus mendukung transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam semua aktivitas perguruan tinggi, termasuk pengelolaan dana dan proses pengambilan keputusan.

Kedua, Kurikulum Berbasis Nilai: Kurikulum pendidikan anti korupsi harus meresap dalam seluruh program studi, mengintegrasikan mata kuliah atau modul yang mempromosikan pemahaman mendalam tentang korupsi, dampaknya, serta cara mencegahnya. Mahasiswa harus diberi kesempatan untuk menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kasus-kasus nyata yang relevan dengan bidang mereka, seperti manajemen maritim dan transportasi.

Ketiga, Pembelajaran Aktif: Pendidikan anti korupsi sebaiknya menggunakan metode pembelajaran aktif, termasuk studi kasus, diskusi, dan proyek berbasis masalah, yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan keterampilan etika. Selain itu, pendekatan ini juga melibatkan penilaian yang adil dan transparan terhadap pemahaman dan perilaku etika mahasiswa.

Keempat, Budaya Institusi yang Berintegritas: Perguruan tinggi pelayaran harus menciptakan budaya institusi yang berfokus pada integritas, dengan mempromosikan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keterbukaan. Penting untuk memiliki mekanisme pelaporan pelanggaran etika yang aman dan anonim

sehingga mahasiswa dan staf merasa nyaman melaporkan perilaku koruptif.

Kelima, Kolaborasi dan Jaringan: Perguruan tinggi pelayaran perlu berkolaborasi dengan organisasi-organisasi anti korupsi, pemerintah, industri maritim, dan lembaga-lembaga terkait lainnya untuk mendukung inisiatif anti korupsi. Melalui kerja sama ini, institusi dapat memperluas dampak pendidikan anti korupsi mereka dan meningkatkan kesadaran tentang isu korupsi di dalam dan di luar kampus.

Dengan mengadopsi pendekatan ini, perguruan tinggi pelayaran dapat menjadi lembaga pendidikan yang mampu membentuk calon-calon pemimpin maritim yang etis, bertanggung jawab, dan berintegritas, yang akan membantu mengurangi risiko korupsi di sektor maritim dan transportasi.

Implikasi

Temuan penelitian mengenai upaya membangun integritas dalam industri maritim melalui pendidikan anti korupsi memiliki implikasi yang signifikan dalam meningkatkan integritas dan mengurangi praktik korupsi di sektor ini. Berikut adalah beberapa implikasi utama dari temuan penelitian ini, ialah sebagai berikut:

Pertama, Pentingnya Pengembangan Materi Anti Korupsi yang Relevan: Temuan menunjukkan bahwa pengembangan materi pendidikan anti korupsi yang relevan dengan sektor maritim sangat penting (Musofiana, 2020). Hal ini berarti perguruan tinggi harus fokus pada mengembangkan materi yang mencakup isu-isu etika dan korupsi yang spesifik untuk industri maritim.

Kedua, Peran Perguruan Tinggi sebagai Agen Perubahan: Penelitian menunjukkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran kunci sebagai agen perubahan dalam mempromosikan integritas di industri maritim (Shchekhovska, dkk.:2016). Ini mencakup memberikan pemahaman yang lebih baik tentang etika dan dampak negatif korupsi.

Ketiga, Kerjasama dengan Industri: Implikasi dari penelitian adalah bahwa kerjasama yang kuat antara perguruan tinggi dan industri maritim sangat diperlukan (Karlson Chitata: 2020). Industri maritim dapat berperan dalam menyediakan sumber daya, studi kasus, dan kesempatan magang untuk mahasiswa, yang dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang isu-isu etika di lapangan.

Keempat, Evaluasi Terus-Menerus: Temuan menunjukkan pentingnya melakukan evaluasi terus-menerus terhadap program pendidikan anti korupsi untuk memastikan efektivitasnya (Rabarijaona 2017). Hal ini memungkinkan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi.

Kelima, Pengembangan Kepemimpinan Berintegritas: Temuan menyoroti pentingnya pengembangan kepemimpinan berintegritas di antara mahasiswa pelayaran (Tuna. dkk, 2002). Ini akan menciptakan generasi pemimpin maritim yang siap untuk mengubah budaya dan praktik korupsi di industri ini.

4. KESIMPULAN

Temuan penting dalam penelitian ini adalah pentingnya memadukan strategi pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum. Perguruan Tinggi Pelayaran menyadari bahwa integritas mahasiswa merupakan fondasi utama untuk membangun industri maritim yang bebas dari korupsi. Oleh karena itu, mereka mengintegrasikan materi-materi anti korupsi ke dalam mata kuliah yang relevan, seperti etika maritim, hukum laut, dan manajemen risiko. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teknis tentang industri maritim, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu menolak praktik korupsi.

Selain itu, pendekatan pendidikan anti korupsi ini juga melibatkan pembelajaran praktis dan studi kasus. Mahasiswa diajak untuk menganalisis situasi-situasi di dunia nyata di mana korupsi dapat terjadi dalam

konteks maritim. Dengan memahami konsekuensi dan dampak negatif korupsi terhadap keberlanjutan industri, mahasiswa lebih cenderung mengembangkan sikap yang menentang korupsi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran praktis seperti ini dapat memperkuat pemahaman konsep anti korupsi dan memberikan mahasiswa keterampilan yang mereka butuhkan untuk mengatasi tantangan di lapangan.

Upaya pembentukan karakter juga menjadi fokus dalam strategi pendidikan anti korupsi ini. Perguruan Tinggi Pelayaran meyakini bahwa integritas tidak hanya dipahami secara kognitif, tetapi juga perlu diinternalisasi sebagai bagian dari nilai-nilai dan perilaku mahasiswa. Oleh karena itu, mereka menerapkan program pengembangan karakter yang melibatkan kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan kepemimpinan, dan mentoring. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menjadi profesional yang terampil secara teknis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh godaan korupsi.

Keterlibatan aktif industri maritim juga menjadi elemen penting dalam pendekatan ini. Perguruan Tinggi Pelayaran menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan maritim dan lembaga terkait untuk memberikan pemahaman praktis tentang tantangan yang dihadapi di lapangan. Workshop, seminar, dan kunjungan industri menjadi sarana untuk menghadirkan para praktisi yang dapat berbagi pengalaman dan memberikan wawasan langsung tentang realitas industri. Hal ini membantu mahasiswa mengaitkan teori dengan praktik, meningkatkan keterlibatan mereka, dan memahami bahwa integritas adalah aspek kritis untuk membangun karir yang berkelanjutan dan sukses di bidang maritim. Dengan demikian, upaya ini memberikan kontribusi positif terhadap perubahan budaya dan perilaku di industri maritim, menuju lingkungan yang lebih bersih dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Boehm, F., & Nell, M. (2006). Anti-corruption training and education (U4 Brief). Bergen: U4 Anti-Corruption Resource Centre, Chr. Michelsen Institute. <https://tinyurl.com/383bwadd>
- Demirel, E. (2020). Maritime education and training in the digital era. *Universal Journal of Educational Research*. <https://doi.org/10.13189/ujer.2020.080939>
- DS, S. H., Nugraha, R. A., & Ardyanti, A. W. T. (2018). Seamanship Human Resource Development Management Strategy Based on Global Competitiveness at Maritime Secondary School-a Case Study in National Maritime Secondary School Purwokerto, Indonesia. *European Journal of Education Studies*. <http://dx.doi.org/10.46827/ejes.v0i0.1474>
- Froholdt, L. L., & Fakhry, A. (2021). Capacity-building and training programme on combating maritime corruption. 1-7. Paper presented at International Maritime Organisation's 71st Technical Cooperation Committee. <https://tinyurl.com/vz8rv87u>
- International Energy Agency (IEA). (2020). Offshore Wind Outlook 2019. <https://www.iea.org/reports/offshore-wind-outlook-2019>
- Kabir, M. D. (2014). Enhancement of seafarers' employability through capacity building in maritime education and training (MET): a case study of Bangladesh. https://commons.wmu.se/cgi/viewcontent.cgi?article=1464&context=all_dissertations
- Karlson Chitata Sama (2020). Corruption in the maritime industry: manifestations and the possibilities to address it by educational measures. The Maritime Commons: Digital Repository of the World Maritime University. https://commons.wmu.se/cgi/viewcontent.cgi?article=2371&context=all_dissertations
- Le Billon, P., & Lujala, P. (2020). "The Political Ecology of War and Resource

- Exploitation: Logging and the Congolese Civil War." *African Affairs*, 119(474), 573-595. <https://doi.org/10.1080/07078552.2003.11827130>
- Lujala, P., & Rustad, S. (2013). "Trading in Compliance: Reputation Markets in the Regulation of the Global Arms Trade and Forestry Sector." *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, 26(4), 679-701.
- Mackay, M., Hardesty, B. D., & Wilcox, C. (2020). The intersection between illegal fishing, crimes at sea, and social well-being. *Frontiers in Marine Science*, 7, 589000. <https://doi.org/10.3389/fmars.2020.589000>
- Musofiana, I. (2020). Anti-corruption education at an early age as a strategic move to prevent corruption in Indonesia. The 2nd Proceeding "Indonesia Clean of Corruption in 2020". <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/the2ndproceeding/article/view/1098>
- Parsa, S. J. S. (2008). Human resource management in the shipping industry (Doctoral dissertation, London Metropolitan University)
- Psaraftis, H. N., & Kontovas, C. A. (2020). Influence and transparency at the IMO: the name of the game. *Maritime Economics & Logistics*, 22, 151-172. <https://link.springer.com/article/10.1057/s41278-020-00149-4>
- Rabarijaona, M. (2017). Impacts of anti-corruption interventions: measures in the shipping industry. https://commons.wmu.se/cgi/viewcontent.cgi?article=1574&context=all_dissertations
- Shchekhovska, L., Gavrylechko, Y., Vakuliuk, V., Bardachov, V., & Husarina, N. (2023). Presentation of legal norms of the anti-corruption policy in order to form the professional competence of higher education students. *Cuestiones Políticas*, 41(77), 749-759. DOI: <https://doi.org/10.46398/cuestpol.4177.49>
- Tuna, O., Cerit, A. G., Kisi, H., & Paker, S. (2002). Problem based learning in maritime education. *IAMU Journal*, 2(2), 14-23. <https://tinyurl.com/mtznukvk>
- Transparency International. (2017). "Corruption in the Maritime Sector." <https://www.transparency.org.uk/publications/corruption-in-the-maritime-sector/>
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2021). Review of Maritime Transport 2021. <https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2021>
- UNODC. (2018). Education for Justice: Anti-Corruption Glossary.
- UNODC. (2019). "Transnational Organized Crime in the Fishing Industry." https://www.unodc.org/documents/toc/Research/TOCTA_Publications/19-03045_CORS_Pirates.pdf
- U4 Anti-Corruption Resource Centre. (2019). "Corruption Risks in the Fisheries Sector." <https://www.u4.no/publications/corruption-risks-in-the-fisheries-sector>
- World Maritime University. (2018). Corruption in the Maritime Sector: Suggested Guidelines for Maritime Education and Training. Retrieved from <https://commons.wmu.se/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=piranha>